

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD
DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH
TIMUR**

TESIS



OLEH :
K A S A D
NPM : 041801031

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
MEDAN
2007**

**FUNGSI PENGAWASAN DPRD
DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH
TIMUR**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



OLEH :
K A S A D
NPM : 041801031

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
MEDAN
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Timur

Nama : K A S A D

NIM : 041801031

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Usman Tarigan, MS

Drs. Agus Suriadi, MSi

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

Drs. Kariono, MA

Drs. Heri Kusmanto, MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Berkat dan Rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini

Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area Sumatera Utara dengan judul Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Timur.

Selesainya Tesis ini bukanlah jerih payah penulis semata, tetapi tak terlepas dari bantuan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulis belajar di Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Drs. Agus Suriadi, Msi selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa dan member masukan bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.
4. Bapak Drs. Kariono, MA sebagai Ketua Program Studi PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
6. Bapak serta Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan.

Terima kasih dan salam kasihku untuk kedua orangtuaku dan keluargaku, yang tidak pernah putus asa memberikan semangat, tenaga serta materi yang tak terhingga dan mengalirkan doa demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat taufik dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2007

Penulis

KASAD

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pengertian Desentralisasi dan Otonomi daerah.....	8
2.2. <i>Good Governance</i> Dalam Rangka Otonomi Daerah.....	13
2.3. Sejarah Lembaga Perwakilan Rakyat.....	21
2.4. Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat	23
2.5. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	28
2.6. Fungsi Pengawasan DPRD.....	32
2.7. Mekanisme Pengawasan.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	43
3.1. Bentuk Penelitian	43
3.2. Identifikasi dan Operasionaliasi Variabel Kajian	43
3.3. Populasi dan Sampel.....	45

3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5. Lokasi Penelitian	47
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	47
BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	50
4.1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur	50
4.2. Letak Geografis.....	55
4.3. Sumber Daya Alam	55
4.4. Demografi	58
4.5. Eksistensi DPRD Kabupaten Aceh Timur.....	60
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
5.1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD	63
5.2. Peran DPRD Dalam Fungsi Pengawasan terhadap Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Timur	80
5.3. Pengawasan Dalam Rangka Good Governance.....	93
5.4. Analisis Data.....	106
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	109
6.1. Kesimpulan	109
6.2. Saran-Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya reformasi pada pertengahan tahun 1998, telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari sistem sentralisasi menuju sistem Desentralisasi. Sasaran utama reformasi ini adalah untuk mewujudkan terciptanya masyarakat Madani (Civil Society) yang menimbulkan sikap demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggung jawab kepada rakyat.

Seiring dengan semangat reformasi dalam upaya menciptakan reorientasi dan reorganisasi dalam tatanan politik pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan peran anggota legislatif dalam merumuskan kebijakan yang mampu menuntun terselenggaranya pemerintahan sesuai nafas otonomi daerah, termasuk lembaga DPRD yang memiliki peran sentral sebagai wadah yang berfungsi perwakilan dan pemegang kepercayaan titipan amanah rakyat. Disamping itu DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah harus mampu mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, serta mampu terlibat langsung dalam merencanakan, menyusun alokasi APBD yang pada akhirnya harus dikontrol dan diawasi kembali terhadap penyelenggara daerah maupun hasil yang dicapai.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah daerah yang mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.

Pemberian Otonomi Daerah merupakan persyaratan untuk terciptanya suatu pembangunan daerah dan nasional yang *sustainable*, hal ini akan dapat tercapai bila pemberian otonomi itu didukung dengan suatu lingkungan yang demokratis. Keterlibatan DPRD mutlak diperlukan dalam proses pembangunan karena bukan saja sebagai perangkat dari Pemerintah Daerah tetapi DPRD juga merupakan suatu forum bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kewenangan yang luas, baik kewenangan wajib maupun kewenangan tambahan belum merupakan suatu jaminan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, apabila tidak didukung oleh ketersediaan PAD sebagai bagian dari aspek sumber pemasukan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur daerah yang cukup, dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam setiap organisasi, terutama organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena dengan pengawasan akan menjamin adanya keserasian antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Calvin Mackenzie, 1986, *American Government: Politics and public Policy*, Random House, New York
- Hedlund dan Hamm, 1987, *Reconceptualising Legislative Accountability/ Urban Society: Public Agencies Under Fires*, Sage Publication, Beverly Hills
- Mardiasmo, 2004, *Serial Otonomi Daerah : Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marbun, B.N. SH, 2006, *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Napitupulu, Paimin Dr, 2005, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR, Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, PT Alumni, Bandung
- Paimin Napitupulu, 2005, *Peran dan pertanggungjawaban DPR: Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Purnomowati, Reni Dwi SH, MH, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Purnomowati, Reni Dwi SH, MH, dan Amir, Makmur, SH, MH, 2005, *Lembaga perwakilan Rakyat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Suparmoko, M., 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek Edisi ke Lima*, BPFE, Yogyakarta.
- Tambunan, Arifin Sari Surungan, 1998, *Fungsi DPR RI menurut UUD 45*, Disertasi, UI Press, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 1999, *DPR dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Theodore J. Lowi dan Benjamin Ginsberg, 1990, *American Government: Freedom and Power*, Random House: New York

Dokumen Lain :

UU No. 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta

UU No. 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta

Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Timur Nomor 3/K/2004 tentang *Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Aceh Timur*

DPRD Kabupaten Aceh Timur, 2006, *Pendapat dan Saran, Serta Usul Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Aceh Timur Terhadap Draft Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2006.*

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 58/2005, 2006, *Petunjuk dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Fikusmedia, Jakarta

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, 2006, *Penjelasan Tim Anggaran Eksekutif tentang Pendapat dan Saran, pertanyaan serta usul panitia anggaran DPRD Kabupaten Aceh Timur Tanggal 05 Januari 2006 terhadap Draft R.APBD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2006.*

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, 2006, *Tambahan Penjelasan Tim Anggaran Eksekutif atas pertanyaan dan tanggapan panitia Legislatif pada Rapat Sinkronisasi tentang Draft R.APBD Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2006.*

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Aceh Timur, 2006, *Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Timur tahun 2005*